

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak dapat hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan.¹⁾ Berinteraksi (berhubungan) berarti melibatkan dua pihak dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok. Perbedaan kepentingan di antara para pihak itulah merupakan awal mula suatu kontrak dibuat.

Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.²⁾

¹⁾ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak pidana dan Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 1

²⁾ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (asas proporsionalitas dalam kontrak Komersial)*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011, hal 1.

Perjanjian kerjasama distribusi antara produsen dan distributor seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, di mana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Akan tetapi di dalam praktek yang terjadi adalah di dalam perjanjian antara produsen dan distributor, pihak produsen berada pada posisi yang lebih dominan di mana keadaan ini seringkali kurang menguntungkan bagi pihak produsen di antaranya adalah dalam hal pemutusan perjanjian secara sepihak oleh produsen pada saat perjanjian belum berakhir ataupun perpanjangan atas perjanjian distributor yang tidak dilakukan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁾ Dengan adanya perjanjian tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah dibuat. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.⁴⁾

Hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUHPdata yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan

³⁾ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 2005, hal 1

⁴⁾ Sanusi Bintang dan Dahlan. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal 15

kesusilaan atau ketertiban umum”,⁵⁾ sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan /atau jasa, pendistribusian produk dari produsen ke konsumen dapat dilakukan melalui jalur keagenan (melalui agen atau agen tunggal) dan jalur distributor (melalui distributor atau distributor tunggal). Perjanjian dalam jalur keagenan berbeda dengan perjanjian jalur distributor. Agen bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipalnya (produsen) sedangkan distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor bertugas untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah tertentu.

Khusus tentang distributor sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Dalam KUHPer mempunyai beberapa ketentuan yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian bernama yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa: "Semua perikatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Perjanjian kerjasama antara CV Surya Badra dengan sales buku yang kemudian disebut sebagai distributor di beberapa wilayah indonesia telah

⁵⁾ Akhmadi, Miru dan Pati, Saka, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 275

disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

CV Surya Badra dalam hubungannya dengan distributor senantiasa mengharapkan agar perjanjian yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa di antara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. Sengketa perjanjian pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaseimbangan di antara para pihak. Dalam perjalanan bisnis CV Surya Badra telah terjadi kerusakan atau terdapat cacat tersembunyi dalam pengiriman barang; kerusakan karena salah penempatan, atau kelalaian lain dari distributor; dan adanya bencana alam dan atau kerusuhan dalam lingkup nasional yang mengakibatkan gagalnya prestasi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Perjanjian Penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Antara Sales Dengan CV. Surya Badra di Boyolali”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan ini maka menjadi penting kemudian menyusun terlebih dahulu rumusan masalah yang akan penulis teliti dan uraikan. Berdasarkan penjelasan dari latarbelakang di atas

dapat ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi antara pihak Sales Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan pihak penerbit buku CV. Surya Badra, baik perjanjian yang mengatur maupun hal yang terjadi di luar perjanjian, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) antara sales dengan CV. Surya Badra dengan pihak sales (distributor) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa di CV. Surya Badra?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penerbit dan percetakan CV Surya Badra dengan pihak distributor buku LKS
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara distributor dengan produsen ditinjau dari perspektif hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

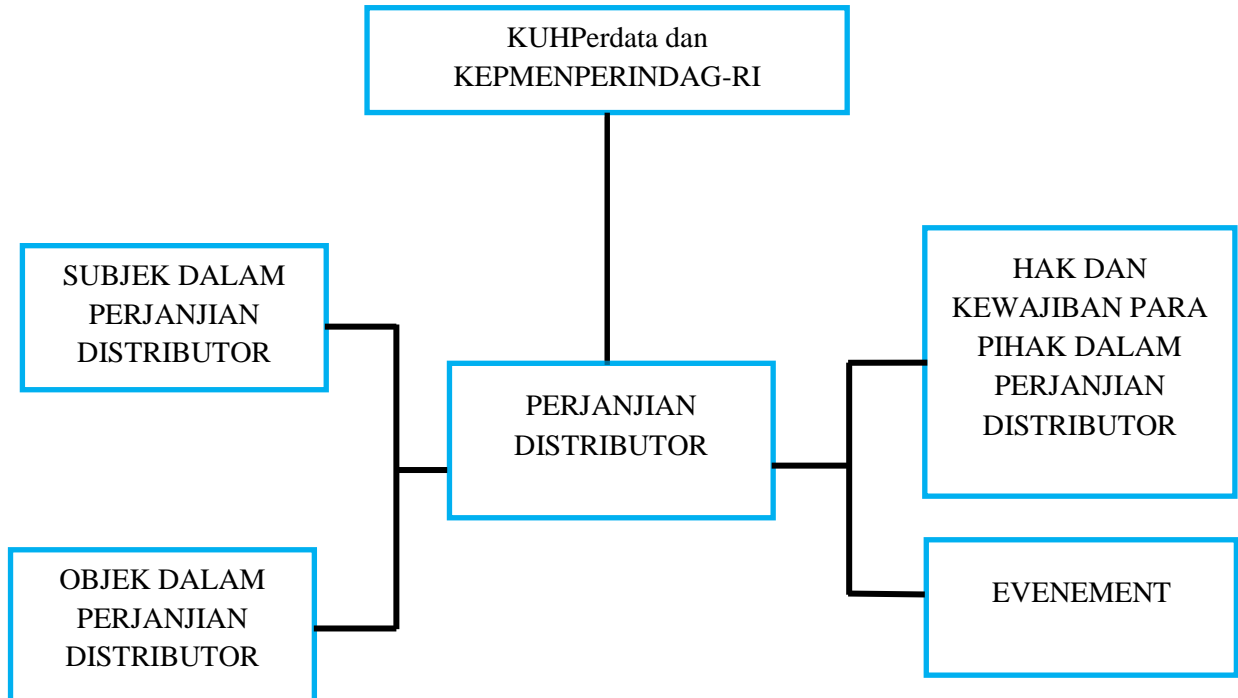
Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi ruang bagi penyusun untuk dapat menuangkan hasil pikiran, serta penelitian hukum, untuk membentuk pola pikir yang sistimatis, dan untuk menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis terhadap perjanjian antara produsen dengan distributor.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Para pihak bebas membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Namun hubungan hukum perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, dalam arti tidak selamanya masing-masing pihak akan merasa puas, terlebih jika pihak distributor tidak menerima barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Di dalam setiap perjanjian selalu ada dua macam subjek yaitu pihak yang berwajib dan pihak yang berhak, namun dalam suatu perjanjian distributor yang merupakan perjanjian timbal balik (*Wederkerige Overeenkomst*) satu pihak tidak selalu menjadi pihak yang berhak, melainkan dalam sudut lain mempunyai beban kewajiban juga terhadap pihak lain, yang dengan demikian tidak selalu menjadi pihak berwajib melainkan menjadi pihak berhak pula terhadap kewajiban dari pihak pertama yang harus dilaksanakan.

Secara khusus Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/I/1978, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.2J/I/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No. I 59/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan

berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdara.

Pada prinsipnya perjanjian distributor di buat dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang disetujui oleh para pihak yang lazimnya telah berbentuk formulir perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pertama yaitu pihak principal (produsen) sebagai subjek, dimana dengan demikian kontrak yang diadakan merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara kolektif dalam bentuk formulir. Pernyataan ini sejalan dengan memperhatikan fakta dari format kontrak yang telah ditandatangani oleh produsen dan distributor di atas secara awam dapat diketahui terdapat beberapa bagian yang memang sengaja dikosongkan sebagai reservasi apabila ternyata terdapat perbedaan antara kontrak distributor yang satu dengan kontrak yang lainnya.

Objek dapat diartikan sebagai hak yang diperlakukan oleh subjek. Dalam hal ini objek hukum adalah distributor. Berkaitan dengan subjek dalam perjanjian distributor penganggung dan bertanggung mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam bentuk perjanjian yang disetujui oleh para pihak.

Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud antara lain:

1. Hak Tertanggung, yaitu:

- a. Berhak untuk menerima produksi buku-buku LKS dan jenis buku yang lain yang telah mendapat izin Produksi dari Pemerintah atas nama CV Surya Badra;
- b. Berhak untuk ditunjuk sebagai Distributor;

- c. Berhak untuk menerima konfirmasi secara tertulis dari CV Surya Badra tentang kesanggupan pemenuhan jumlah pesanan. Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan yang bersangkutan;
- d. Berhak untuk menerima kiriman buku-buku dari CV Surya Badra selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan tersebut, sesuai jenis, jumlah buku , dan kantor yang dituju;
- e. Berhak untuk mengasuransikan pengiriman buku-buku pada perusahaan asuransi dengan polis, untuk dan atas nama Distributor
- f. Berhak untuk menerima buku-buku dengan harga yang telah ditentukan;

2. Kewajiban Tertanggung

- a. Wajib memenuhi target penjualan yang telah disepakati antara CV Surya Badra.
- b. Wajib mengusahakan dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan Produk buku LKS CV Surya Badra di wilayahnya.
- c. Berkewajiban untuk memasarkan produk buku-buku LKS yang diproduksi oleh CV Surya Badra.
- d. Setiap tahun sebelum tanggal 31 Januari berkewajiban memberikan rencana pesanan, apabila sesudah tanggal tersebut tidak ada rencana pesanan maka yang digunakan adalah seperti pesanan tahun yang berlalu;
- e. Berkewajiban memberi surat pesanan rutin bulanan dalam bulan-bulan sesudah bulan kenaikan harga ;
- f. Berkewajiban untuk ikut menentukan harga buku-buku LKS CV Surya Badra;

- g. berkewajiban membayar harga buku-buku LKS selambat lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung mulai penerimaan barang;
- h. Berkewajiban membayar apabila ada keterlambatan pembayaran dengan mengenakan sangsi satu permil per hari dari jumlah yang belum dibayar;
- i. Berkewajiban menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan;
- j. Wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang di terimanya dari Konsumen kepada CV Surya Badra melalui media elektronik berupa email. Dalam pengaturan hak dan kewajiban tersebut dijelaskan beberapa prestasi dan kontra prestasi dari para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. Hak Penanggung, yaitu:

- a. Berhak untuk menunjuk distributor untuk memasarkan produk buku LKS yang diproduksi atau yang akan diproduksi kemudian;
- b. Setiap tahun sebelum tanggal 31 Januari berhak menerima rencana pesanan, apabila sesudah tanggal tersebut tidak ada rencana pesanan maka yang digunakan adalah seperti pesanan tahun yang telah berlalu;
- c. Berhak menerima surat pesanan rutin bulanan dalam bulan-bulan sesudah bulan kenaikan harga bulan bonus;
- d. Berhak menentukan harga ;
- e. Berhak menerima pembayaran harga selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung mulai pengiriman barang;

- f. Berhak menerima pembayaran apabila ada keterlambatan pembayaran dengan mengenakan sanksi satu permil per hari dari jumlah yang belum dibayar;
- g. Berhak menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan.
- h. Berhak mengakhiri perjanjian apabila masa berlakunya telah habis.

4. Kewajiban Penanggung, yaitu:

- a. Menjamin bebasnya produk dari kerusakan dan cacat produksi serta akan mengganti produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta apabila adanya cacat produksi didalam produk tersebut tanpa membebankan biaya apapun pada distributor.
- b. Berkewajiban untuk memproduksi buku-buku yang lain yang telah mendapat izin produksi
- c. Berkewajiban untuk mengangkat Distributor sebagai perantara pen-distribusian;
- d. Berkewajiban memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Distributor tentang kesanggupan pemenuhan jumlah pesanan. Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan yang bersangkutan;
- e. Berkewajiban untuk mengirim barang ke gudang Distributor selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan tersebut, sesuai jenis, jumlah barang, dan Kantor yang dituju;
- f. Berkewajiban untuk menanggung biaya bersama seandainya biaya pengiriman ke cabang Distributor di luar Kota Surakarta melebihi biaya yang seharusnya;

- g. Berkewajiban untuk mengasuransikan pengiriman buku LKS pada perusahaan asuransi dengan polis dan untuk dan atas nama Distributor
- h. Berkewajiban untuk menentukan harga Netto dari buku-buku yang dijual dan ditentukan pula profit yang ditentukan dari harga beli;
- i. Bertanggung jawab untuk mengurus dan mendaftarkan (registrasi) produk;
- j. Berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara CV Surya Badra dan Distributor.

Para pihak juga wajib bertanggung jawab atas segala perjanjian dan isi perjanjian distributor yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Ketentuan dalam perjanjian keagenan/ distributor ini dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengikat para pihak secara sah untuk mematuhi hak dan kewajiban masing-masing. Bila terjadi wanprestasi di antara para pihak maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah melalui pembicaraan perundingan antara para pihak. Jika para pihak tidak menyelesaikan dalam musyawarah, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau kantor pengadilan setempat.

Evenement dalam kontrak distributor dapat pula diartikan sebagai peristiwa yang tidak pasti, dijelaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi kapan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi kemalangan atau kerugian yang mungkin terjadi ada kalanya disebabkan dari manusia itu sendiri maupun berasal dari luar diri manusia misalnya yang berasal dari luar manusia yaitu kerugian yang disebabkan karena bencana alam, perang dan wabah

penyakit sedangkan yang berasal dari diri manusia itu sendiri adalah karena kesalahan atau kelaliannya sendiri misalnya adalah kebakaran yang mengakibatkan harta miliknya menjadi musnah. Oleh karena itu dalam hal untuk mencegah akan peristiwa tidak pasti tersebut timbulah asuransi yang berfungsi untuk pengalihan risiko, risiko disini dapat pula diartikan sebagai kemungkinan mengalami kerugian.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti – bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.⁶⁾ Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan Doktrinal (Normatif), karena konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum berdasarkan madzhab filsafat hukum positivistik. Dimana yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan penelitian terkait dengan asuransi dan objekwisata, yang dilakukan dengan meneliti data bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan

⁶⁾ Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 1

cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang ada mengenai produsen dan distributor. Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat dan jelas terkait dengan permasalahan yang diambil.

3. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data yang digunakan oleh penulis adalah berupa kontrak distributor yang dibuat antara distributor dengan produsen. Kontrak distributor tersebut diperoleh penulis bersumber dari perusahaan percetakan dan penerbitan CV Surya Badra di Jln. Ngemplak RT 01, RW 05, Donohudan Ngemplak Boyolali.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui

pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.⁷⁾

Dalam hal ini teknik pengumpulan data primer yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Karyawan perusahaan percetakan dan penerbitan CV Surya Badra di Jln. Ngemplak RT 01, RW 05, Donohudan Ngemplak Boyolali..

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca dengan mempelajari literatur–literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2) Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a) Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu proses pengamatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti untuk memperoleh gambaran nyata yang berkaitan dengan penelitian.

⁷⁾ Suratman an Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53

b) Wawancara (*Interview*)

Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai direktur perusahaan percetakan dan penerbitan CV Surya Badra mengenai system perjanjian distributor dan hak dan kewajiban produsen dan distributor.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif dan penalaran deduktif yaitu dengan cara, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mempelajari dari bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, Pasal 1319 KUHPer, Pasal 1338 KUHPer, Pasal 1320 KUHPer. Pasal 1337 KUHPer, *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (BRO 34) tentang Penyaluran Perusahaan; Kepmendag. No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan. Kepmenperindag-RI No. 159/MPP/Kep/4/ 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan dan Doktrin Ahli hukum.
- b. Mempelajari objek penelitian berupa kontrak distributor antara perusahaan percetakan dan penerbitan CV Surya Badra dengan seluruh distributor.
- c. Membandingkan premis mayor dengan premis minor serta menarik kesimpulan jika kontrak distributor antara perusahaan percetakan dan

penerbitan CV Surya Badra dengan para distributor sudah sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Rangka untuk mempermudah dalam memahami gambaran menyeluruh mengenai penulisan ini, disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Asas - Asas Perjanjian
 - 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
 - 5. Overmacht dan Akibat Hukumnya
 - 6. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian

B. Perjanjian Distributor

1. Pengertian Perjanjian Distributor
2. Subjek Hukum dalam Perjanjian Distributor
3. Objek Hukum dalam Perjanjian Distributor
4. Hak dan Kewajiban Produsen dan Distributor
5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Distributor
6. Overmacht dan akibat hukumnya dalam Perjanjian Distributor

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Subjek Perjanjian Hukum antara Pihak Principal CV Surya Badra dengan Distributor
2. Objek Perjanjian Hukum antara Pihak Principal CV Surya Badra dengan Distributor
3. Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak Dalam Perjanjian Hukum Pihak Principal CV Surya Badra dengan Distributor
4. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian
5. Wanprestasi dari Para Pihak dan Akibat Hukumnya
6. Overmacht dan akibat hukumnya

B. Pembahasan

1. Konstruksi hubungan hukum dalam penjualan buku
Lembar Kerja Siswa (LKS) antara Pihak Principal
CV Surya Badra dengan Distributor
2. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat
dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa di CV.
Surya Badra

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA